LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
BULAN OKTOBER 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 52 Palu, Kode Pos 94231

Telp. 0451 – 483385, 0811 4444 064 (CICA)

Website: ptunpalu.go.id

Email: ptunpalu@gmail.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi 2

Bab I Pendahuluan 4

A. Sejarah Singkat..... 4

B. Maksud dan Tujuan 6

Bab II Tugas Pokok dan Fungsi 7

A. Manajemen Kesekretariatan 7

1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 7

1.1. Struktur Organisasi 7

1.2. Sumber Daya Manusia 9

1.3. Promosi, Mutasi dan Pensiun..... 11

1.4. Pengelolaan Database SIKEP 12

2. Umum dan Keuangan 13

2.1. Tata Kearsipan dan Perpustakaan 13

2.1.1. Pengelolaan Persuratan.....13

2.1.2. Pengelolaan Perpustakaan 14

2.1.3. Sarana dan Prasarana Kearsipan Kepustakaan.....14

2.2. Pengelolaan Aset dan BMN.....14

2.2.1. Data Tanah, Gedung dan Kendaraan 14

2.2.2. Penetapan Status Penggunaan BMN 18

2.2.3. Penghapusan BMN 18

2.2.4. Pengalihan Status BMN……18

2.3. Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara 18

2.3.1. Laporan Realisasi Anggaran..... 18

2.3.2. Laporan PNBP 19

2.3.3. Data Persekot/Uang Muka Gaji 19

2.3.4. Ralat SPM.....19

3. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 20

3.1. Revisi DIPA/POK..... 20

3.2. Pengelolaan Website dan Jaringan..... 20

B. Manajemen Kepaniteraan 20
1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara 20
1.1. Laporan Keadaan Perkara 21
1.2. Laporan Jenis Perkara 22
1.3. Laporan Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali..... 22
2. Laporan Pelaksanaan SIPP 22
3. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan 22
4. Pelayanan dan Posbakum 23
5. Tata Kelola Arsip Perkara..... 24
BAB III Kesimpulan dan Rekomendasi..... 25
A. Kesimpulan..... 25
B. Rekomendasi..... 25
LAMPIRAN..... 26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1997 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak H. M. Soeharto.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu merupakan Pengadilan Kelas I yang berkedudukan di Kota Palu dan beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 52 Palu.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang terjadi di Wilayah Hukumnya yang meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi:

1. Kota Palu
2. Kabupaten Banggai
3. Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kabupaten Banggai Laut
5. Kabupaten Buol
6. Kabupaten Donggala
7. Kabupaten Morowali
8. Kabupaten Morowali Utara
9. Kabupaten Parigi Moutong
10. Kabupaten Poso
11. Kabupaten Tojo Una-Una
12. Kabupaten Sigi
13. Kabupaten Tolitoli

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diresmikan bersama-sama dengan PTUN Palangkaraya, PTUN Bengkulu, PTUN Jambi, dan PTUN Kendari secara simbolis oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Muladi, S.H. pada tanggal 29 Oktober 1998 yang dipusatkan di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor dan sekaligus ditandai dengan mulainya beroperasi Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sejak beroperasi pada tahun 1998 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengalami pergantian pimpinan sebanyak 14 (empat belas) kali, yaitu sebagai berikut:

1.	Jacob Gerungan, S.H.	(1998 s.d. 1999)
2.	Sutoyo, S.H.	(1999 s.d. 2001)
3.	Sulistyo, S.H.	(2001 s.d. 2002)
4.	Achmad Husein, S.H.	(2003 s.d. 2006)
5.	Dilmar Tatawi, S.H.	(2006 s.d. 2007)
6.	Kamer Togatorop, S.H., M.AP.	(2007 s.d. 2010)
7.	Nabari Sembiring, S.H.	(2010 s.d. 2011)
8.	H. Asmoro Budi Santoso, S.H.	(2011 s.d. 2012)
9.	H. Satibi Hidayat Umar, S.H.	(2012 s.d. 2015)
10.	Fari Rustandi, S.H., M.H.	(2015 s.d. 2020)
11.	Nur Akti, S.H.	(2020 s.d. 2022)
12.	Susilowati Siahaan, S.H., M.H.	(2022 s.d. 2023)
13.	Danan Priambada, S.H., M.H.	(2023 s.d. 2024)
14.	Rosidah, S.H.	(2024 s.d. sekarang)

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Manajemen Kesekretariatan

1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Susunan Struktur Organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
STRUKTUR ORGANISASI
(Sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2015)

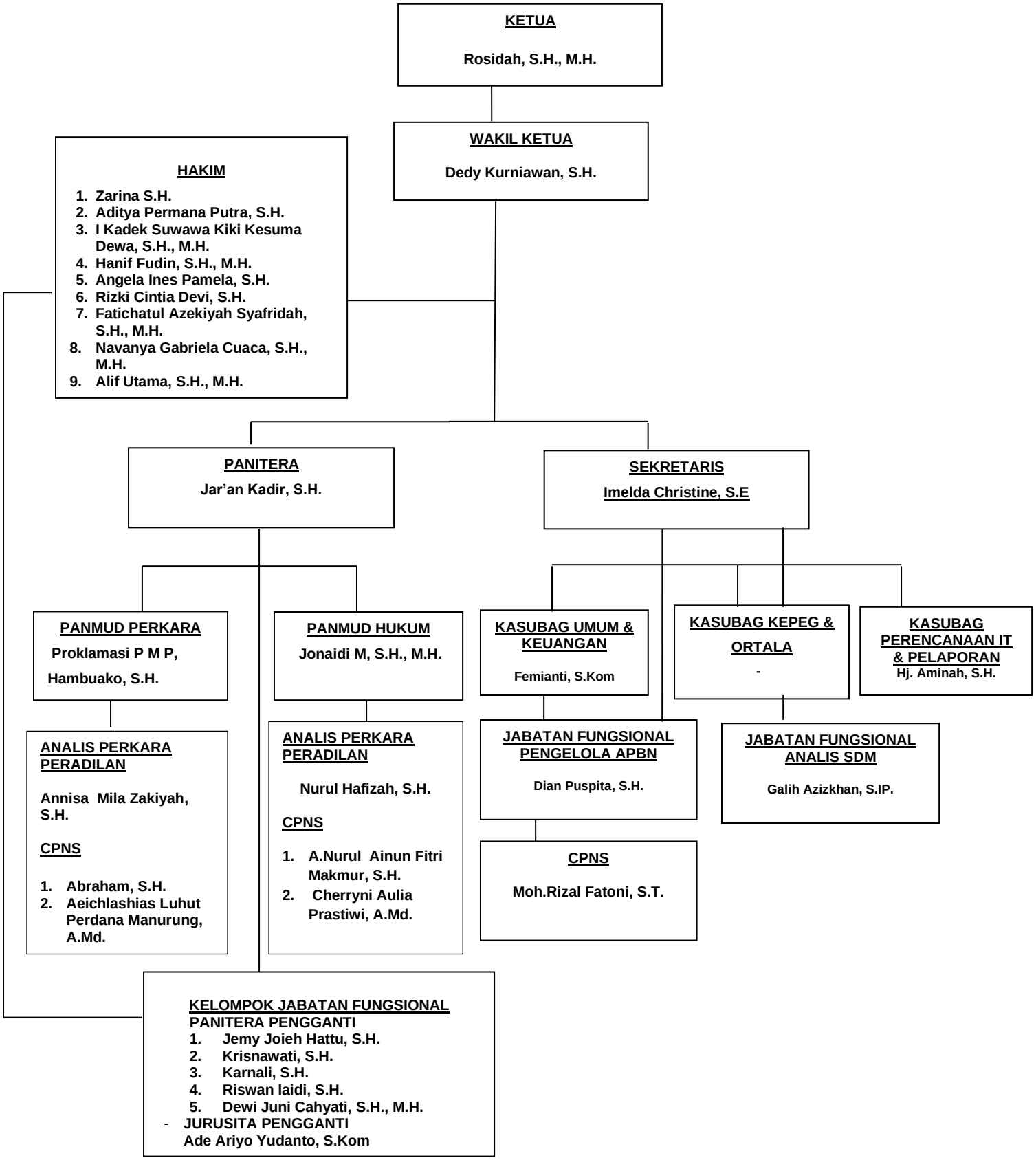

1.2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, Pegawai, dan PPPK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

Ketua	: 1 orang
Wakil Ketua	: 1 orang
Hakim	: 9 orang
Panitera	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Panitera Muda Perkara	: 1 orang
Panitera Muda Hukum	: 1 orang
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	: -
Kasub Umum dan Keuangan	: 1 orang
Kasub Perencanaan IT dan Pelaporan	: 1 orang
Fungsional SDM Ahli Pertama	: 1 orang
Fungsional Pengelola Keuangan APBN	: 1 orang
Panitera Pengganti	: 5 orang
Jurusita Pengganti	: 1 orang
Analis Perkara Peradilan	: 2 orang
CPNS	: 5 orang
PPPK	: 11orang

Sedangkan susunan personel Pegawai dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Gol
1.	Ketua	Rosidah, S.H., M.H.	IV/c
2.	Wakil Ketua	Dedy Kurniawan, S.H.	IV/b
3.	Hakim	Zarina, S.H.	IV/a
4.	Hakim	Aditya Permana Putra, S.H.	III/b
5.	Hakim	I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, S.H., M.H.	III/a
6.	Hakim	Hanif Fudin, S.H., M.H.	III/a
7.	Hakim	Angela Ines Pamela, S.H.	III/a
8.	Hakim	Rizki Cintia Devi, S.H.	III/a

9.	Hakim	Fatichatul Azekiyah Syafridah, S.H., M.H.	III/a
10.	Hakim	Navanya Gabriela Cuaca, S.H., M.H.	III/a
11.	Hakim	Alif Wili Utama, S.H., M.H.	III/a
12.	Panitera	Jar'an Kadir, S.H.	IV/a
13	Sekretaris	Imelda Christine, S.E	III/d
14.	Panmud Perkara	Proklamasi PMP H, S.H.	III/d
15.	Panmud Hukum	Jonaidi Madri, S.H., M.H.	IV/a
16.	Kasubbag PTIP	Hj. Aminah, S.H.	III/d
17.	Kasubbag Umum & Keuangan	Femianti, S.Kom	III/d
18.	Panitera Pengganti	Jemy Joieh Hattu, S.H.	III/d
19.	Panitera Pengganti	Krisnawati, S.H.	III/d
20.	Panitera Pengganti	Karnali, S.H.	III/c
21.	Panitera Pengganti	Riswan Laidi, S.H.	III/a
22.	Panitera Pengganti	Dewi Juni Cahyati, S.H., M.H	III/b
23.	Fungsional SDM Ahli Pertama	Galih Azizkhan, S.IP.	III/b
24.	Fungsional Pengelola APBN	Dian Puspita, S.H.	III/a
25.	Jurusita Pengganti	Ade Ario Yudanto, S.Kom.	III/a
26.	Analis Perkara Peradilan	Annisa Mila Zakiya, S.H.	III/a
27.	Analis Perkara Peradilan	Nurul Hafiza, S.H.	III/a
28.	CPNS Analis Perkara Peradilan	A.Nurul Ainun Fitri Makmur, S.H.	III/a
29.	CPNS Analis Perkara Peradilan	Abraham, S.H.	III/a
30.	CPNS Teknisi Sarana dan Prasarana	Moh Rizal Fatoni, S.T.	III/a
31.	CPNS Analis Dokumentasi Hukum	Aeichlashias Luhut Perdana Manurung, A.Md.	II/c
32.	CPNS Analis Dokumentasi Hukum	Cherryni Aulia Prastiwi, A.Md.	II/c
33.	Penata Layanan Operasional	Moh Fachri Darmawan, S.H.	IX
34.	Penata Layanan Operasional	Moh Fauzan,S.H.	IX

35	Penata Layanan Operasional	Nur Ramadhan, S.H.	IX
36	Penata Layanan Operasional	Winda, S.E	IX
37	Penata Layanan Operasional	Faldy Abraham, S.H.	IX
38	Penata Layanan Operasional	Ulil Amri, S.E.	IX
39	Penata Layanan Operasional	Ade Chandra Permana, S.SI.	IX
40	Operator Layanan Operasional	Achmad Reyzha	V
41	Operator Layanan Operasional	Franky Atimang	V
42	Operator Layanan Operasional	Sukarno	V
43	Operator Layanan Operasional	Samsul Bahri	V

1.3. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Pejabat dan atau pegawai yang mendapat promosi atau mutasi adalah sebagai berikut:

Data Promosi dan Mutasi

No	Nama	Asal Mutasi	Mutasi
1.	Jar'an Kadir, S.H.	PTUN Banjarmasin	PTUN Palu

Pejabat dan atau pegawai yang memasuki masa pensiun adalah sebagai berikut:

Data Pegawai Memasuki Masa Pensiun

No	Nama	Masa Kerja	TMT Pensiun
-	-	-	-

1.4. Pengelolaan Database SIKEP

Database SIKEP dikelola oleh Plt.Kasub Kepegawaian dan Ortala sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Pemutakhiran database SIKEP dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh Saudara Galih Azizkhan, S.IP sebagai user administrator satuan kerja.

Hasil rekapitulasi kelengkapan database Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada aplikasi sikep adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Database Sikep

No	Nama	Status
1.	Rosidah, S.H., M.H.	Lengkap
2.	Dedy Kurniawan, S.H.	Lengkap
3.	Zarina, S.H.	Lengkap
4.	Aditya Permana Putra, S.H.	Lengkap
5.	I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, S.H., M.H.	Lengkap
6.	Hanif Fudin, S.H., M.H.	Lengkap
7.	Angela Ines Pamela, S.H.	Lengkap
8.	Rizki Cintia Devi, S.H.	Lengkap
9.	Fatichatul Azekiyah Syafridah, S.H., M.H.	Lengkap
10.	Navanya Gabriela Cuaca, S.H., M.H.	Lengkap
11.	Alif Wili Utama, S.H., M.H.	Lengkap
12.	Jar'an Kadir, S.H.	Lengkap
13	Imelda Christine, S.E.	Lengkap
14	Proklamasi PMP H, S.H.	Lengkap
15.	Jonaidi Madri, S.H., M.H.	Lengkap
16.	Hj. Aminah, S.H.	Lengkap
17.	Femianti, S.Kom.	Lengkap
18	Krisnawati, S.H.	Lengkap
19.	Jemmy Joeh Hattu, S.H.	Lengkap
20.	Karnali, S.H.	Lengkap

21.	Riswan Laidi, S.H.	Lengkap
22.	Dewi Juni Cahyati, S.H., M.H.	Lengkap
23.	Galih Azizkhan, S.IP.	Lengkap
24.	Dian Puspita, S.H.	Lengkap
25.	Ade Ario Yudanto, S.Kom.	Lengkap
26.	Annisa Mila Zakiya, S.H.	Lengkap
27.	Nurul Hafiza, S.H.	Lengkap
28.	A.Nurul Ainun Fitri Makmur, S.H.	Lengkap
29.	Abraham, S.H.	Lengkap
30.	Moh Rizal Fatoni, S.T.	Lengkap
31.	Aeichlashias Luhut Perdana Manurung, A.Md.	Lengkap
32.	Cherryni Aulia Prastiwi, A.Md.	Lengkap
33.	Moh Fachri Darmawan, S.H.	Lengkap
34.	Moh Fauzan, S.H.	Lengkap
35.	Nur Ramadhan, S.H.	Lengkap
36.	Winda, S.E.	Lengkap
37.	Faldy Abraham, S.H.	Lengkap
38.	Ulil Amri, S.E.	Lengkap
39.	Ade Chandra Permana, S.SI.	Lengkap
40	Achmad Reyzha	Lengkap
41	Franky Atimang	Lengkap
42	Sukarno	Lengkap
43	Samsul Bahri	Lengkap

2. Umum dan Keuangan

2.1. Tata Kearsipan dan Perpustakaan

2.1.1. Pengelolaan Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat masuk dan surat keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian umum dan keuangan. Data statistik surat masuk dan surat keluar **periode Oktober 2025**:

Data Surat Masuk dan Surat Keluar

No	Bagian	Jumlah	
		Surat masuk	Surat keluar
	Kesekretariatan		
1	Ketua	34	59
2	Sekretaris	3	58
	Kepaniteraan		
1	Ketua	17	-
2	Panitera	-	26
	Jumlah	**54**	**143**

2.1.2. Pengelolaan Perpustakaan

Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan Oktober 2025 berjumlah (909) buah. Pengelolaan database perpustakaan dicatat ke dalam buku register pustaka. Pengelolaan database secara elektronik sudah dilakukan melalui aplikasi ***SLIM Senayan.***

2.1.3. Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan

Perlengkapan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih sangat kurang. Sarana dan Prasarana yang tersedia pada penyediaan ruangan khusus perpustakaan, berupa lemari buku. Sedangkan meja dan kursi petugas dan meja baca untuk pengunjung belum tersedia.

2.2. Pengelolaan Aset dan BMN

2.2.1. Data Tanah, Gedung dan Kendaraan

1. Tanah Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu seluas 3.250 m², Luas Gedung 2.281.63 m², terletak di Jalan Prof.Moh Yamin No 52 Palu, Sulawesi Tengah. Tanah Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu seluas 2.123 m² terletak di Jalan Kijang Raya Nomor 47 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

- Data Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai berikut:

No	Type	Tahun	Luas Tanah	Luas Bangunan
1	C Permanen	1996	265 m²	77 m²
2	C Permanen	1996	265 m²	77 m²
3	C Permanen	1996	265 m²	77 m²
4	C Permanen	1996	265 m²	77 m²
5	C Permanen	1996	265 m²	77 m²
6	C Permanen	1996	265 m²	77 m²
7	C Permanen	2003	265 m²	77 m²
8	C Permanen	2003	265 m²	77 m²

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berkut:

1. Rumah dinas type C luas bangunan:77 m² Nomor rumah 47 A untuk Ketua sesuai Surat Keputusan Nomor: 460/SEK.PTUN.W4-TUN2/RT1/XII/2024;
2. Rumah dinas type C luas bangunan:77 m² Nomor rumah 47 B untuk Wakil Ketua sesuai Surat Keputusan Nomor: 431/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL.1.1.2/IX/2025;
3. Rumah dinas type C luas bangunan:77 m² Nomor 47 E untuk Hakim a.n. Aditya Permana Putra, S.H. sesuai Surat Keputusan Nomor: W4-TUN5/187/PL.06.06/V/2022;
4. Rumah dinas type C luas bangunan:77 m² Nomor rumah 47 F untuk Hakim a.n. I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, S.H., M.H. sesuai Surat Keputusan Nomor: 321/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.1.2/VII/2025;
5. Rumah dinas type C luas bangunan:77 m² untuk Nomor rumah 47 H untuk Hakim a.n. Alif wili Utama, S.H., M.H. sesuai Surat Keputusan Nomor: 335/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.1.2/VII/2025;
6. Rumah dinas type C luas bangunan:77 m² Nomor rumah 47 C untuk Hakim a.n. Angela Ines Pamela, S.H. sesuai Surat Keputusan Nomor: 427/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL 1.1.2/IX/2025;

7. Rumah dinas type C luas bangunan:77 m² Rumah Nomor 47 G untuk Sdr. Moh.Rizal Fatoni, S.T. sesuai Surat Keputusan Nomor: 440/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL 1.1.2/IX/2025;
8. Rumah dinas type C luas bangunan:77m² Nomor Rumah 47 D untuk Panitera sesuai Surat Keputusan Nomor: 519/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.1.2/X/2025.

- Kendaraan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terdiri dari roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dan sudah dibuatkan Surat Keputusan Penggunaan Kendaraan Dinas.
- Data kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai berikut:

1. Kendaraan Dinas Toyota Inova dengan Nomor Polisi DN B 1910 PQG diperuntukan untuk Ketua dengan Nomor: 320/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.1.2/VII/2025
2. Kendaraan Dinas Vios dengan Nomor Polisi DN 1051 SH diperuntukan untuk Wakil Ketua dengan Nomor: 434/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.1.2/IX/2025;
3. Kendaraan Dinas Toyota KF 80 dengan Nomor Polisi DN 1498 ST diperuntukan Operasional Kantor/Sekretaris dengan Surat Keputusan Nomor: 498/SEK.W4-TUN2/PL1.1.2/VIII/2025;
4. Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Nomor Polisi DN 4819 A diperuntukan a.n. Femianti, S.Kom dengan Surat Keputusan Nomor: 494/SEK.PTUN.W4TUN2/PL1.1.2/IX/2025;
5. Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Nomor Polisi DN 4821 A diperuntukan a.n. Aminah, S.H. dengan Surat Keputusan Nomor: 76/SEK.PTUN.W4TUN2/PL1.1.2/I/2025;
6. Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Nomor Polisi DN 4438 A diperuntukan a.n. Proklamasi PMP Hambuako, S.H. dengan Surat Keputusan Nomor: 91/SEK.PTUN.W4TUN2/PL1.1.2/I/2025;
7. Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Nomor Polisi DN 4437 A a.n. Riswan Laidi, S.H. dengan Surat Keputusan Nomor: 88/SEK.PTUN.W4TUN2/PL1.1.2/I/2025;

8. Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Nomor Polisi DN 4190 A a.n. Jonaidi Madri, S.H., M.H. dengan Surat Keputusan Nomor: 85/SEK.PTUN.W4TUN2/PL1.1.2/I/2025;
9. Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Nomor Polisi DN 6389 ST a.n. Galih Azizkhan, S.IP Surat Keputusan Nomor: 497/SEK.PTUN.W4TUN2/PL1.1.2/IX/2025;
10. Kendaraan Dinas Roda Dua Nomor Polisi DN 4820 A a.n. Jar'an Kadir, S.H. dengan Surat Keputusan Nomor: 428/SEK.PTUN.W4TUN2/PL1.1.2/IX/2025;

    Perlu adanya penambahan Kenderaan Dinas Roda 4 (empat) dan Dinas Roda 2 (dua), Untuk Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) sebanyak 3 Unit diperuntukan Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 3 Unit diperuntukan untuk Bendahara, Bendahara Keuangan Perkara dan Juru Sita Pengganti.

- Kondisi Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) berdasarkan Tahun dan Type Kendaraan sebagai berikut:

No	Type Kendaraan	Tahun	Kondisi	Pengguna
1	Toyota Innova	2024	Baik	Ketua
2	Toyota Vios	2007	RR	Wakil Ketua
3	Toyota KF 80	2001	RB	Sekretaris/ Operasional
4	Honda NF 125 D	2006	RR	Panitera Pengganti
5	Honda Supra 125 SFC	2007	Baik	Panmud Hukum
6	Honda Revo	2009	Baik	Panitera
7	Honda Revo	2009	Baik	Kasubbag PTIP
8	Honda Revo	2009	Baik	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
9	Honda Supra NF 125 TRF	2008	Baik	Kasubbag Umum dan Keuangan
10	Honda GL Pro	2006	RR	Panitera Muda Perkara

2.2.2. Penetapan Status Penggunaan BMN

Tidak terdapat Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN pada Bulan Oktober Tahun 2025

2.2.3. Penghapusan BMN

Tidak ada Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Bulan Oktober 2025

2.2.4 Pengalihan Status BMN

Tidak terdapat alih status BMN Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Bulan Oktober Tahun 2025.

2.3 Laporan Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara

2.3.1 Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan pos belanja:

Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Oktober 2025

No	Belanja	DIPA (005.01)	Realisasi		Sisa
			Bulan ini	S.d. Bln ini	
1	Pegawai(51)	5.279.562.000,-	459.880.404,-	4.130.609.020,-	1.148.952.980,-
2	Barang(52)	1.122.205.000,-	119.867.119,-	963.418.349-	158.786.651,-
3	Modal(53)	120.000.000,-	119.659.999,-	119.659.999,-	340.001.00,-

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan pos belanja:

Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan Oktober 2025

No	Belanja	DIPA (005.05)	Realisasi		Sisa
			Bulan ini	S.d. Bln ini	
1	Barang (52)	123.205.000,-	19.700.000,-	60.200.000,-	63.005.000,-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran

2.3.2 Laporan PNBP

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode Bulan Oktober 2025 secara umum sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan PNBP

No	Akun	Jenis Pendapatan	Bulan lalu	Bulan ini
1	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.141.033	-
2	425151	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	744.000,-	1.190.400,-
3	423911	Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
4	423991	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0
5	425232	Uang Meja (Leges)	50.000,-	80.000,-
6	425233	Ongkos Perkara	430.000,-	580.000,-
7	425239	Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	529.500,-	615.000,-
		Total	4.984.533,-	2.465.400,-

Laporan realisasi PNBP secara rinci dapat dilihat pada tabel lampiran.

2.3.3. Data persekot / Uang Muka Gaji

Tidak ada Pegawai dan Hakim mengajukan persekot gaji pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

2.3.4. Ralat SPM

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak melakukan ralat SPM.

3. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

3.1. Revisi DIPA/POK

Pada Bulan Oktober 2025 revisi ke 9 (sembilan) DIPA 005.01 dan revisi ke 4 (empat) DIPA 005.01.

3.2. Pengelolaan Website dan Jaringan

- Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggung jawab pengelolaan ada pada Kasubag PTIP. PTUN Palu menggunakan penyedia layanan internet dari Telkom, dengan paket astinet Dedicated 25 Mbps dan Broadband 200 Mbps. Nomor: K.TEL.1097/HK.810/DR7-1A200000/2024 Tipe Permintaan layanan baru.
- Kondisi jaringan internet pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sampai saat ini masih memadai untuk penggunaan layanan, namun perlu adanya back up internet, apabila adanya gangguan internet.

B. Manajemen Kepaniteraan

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode Bulan Oktober 2025 sebagai berikut:

No	Perkara	Sisa Bln lalu	Masuk bln ini	Putus bln ini	Sisa bln ini	Keterangan			
						Cabut	Gugur	PLW	Dismissal
1	Gugatan	20	6	2	24	-	-	-	-
2	Banding	1	-	-	1	-	-	-	-
3	Kasasi	5	-	3	2	-	-	-	-
4	PK	5	2	2	5	-	-	-	-
5	Eksekusi	15	-	-	15	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode Bulan Oktober 2025 sebagai berikut:

Laporan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Sisa bulan lalu	Masuk	Dicabut	Dis-missal	Perlawanan		Putusan			Sisa bulan ini
						Di-terima	Di-tolak	Cabut	Di-kabulkan	Tidak diterima	
1	Pertanahan	5	2	-	-	-	-	1	-	-	6
2	Kepegawaian	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Perizinan	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang & Jasa	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Badan Hukum /Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pergantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	3	2	-	-	-	-	1	-	-	4
17	Lain-lain	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Total	**20**	**6**	**-**	**-**	-	-	**2**	**-**	**-**	**24**

1.3. Laporan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Laporan Jumlah Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode Bulan Oktober 2025, yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Laporan Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum

No	Perkara yang mengajukan	Sisa Bln Lalu	Masuk Bulan Ini	Putus	Sisa Bln ini
1	Banding	1	-	-	1
2	Kasasi	5	-	3	2
3	Peninjauan Kembali	5	2	2	5
	Total	**11**	**2**	**5**	**8**

2. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh *stakeholder* yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah SIPP Versi 6.0.0 Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan Oktober 2025 adalah sebesar ***33.33%*** (***data dari SIPP MA***).

3. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah memiliki sarana meja Informasi dan Pengaduan, dan Petugas Meja Informasi dan Pengaduan sudah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 577/KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 32/KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/I/2025, tanggal 24 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Sarana lainnya adalah tersedianya buku register meja informasi, blangko-blangko permohonan. Untuk Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SPAN sudah menggunakan aplikasi Whistle Blowing System Mahkamah

Agung RI yaitu aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI).

Permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode bulan Oktober 2025 nihil.

Buku Register Informasi

No	Pemohon	Tgl diterima	Objek permohonan	Tindak Lanjut
-	-	-	-	-

Jumlah pengaduan pada Bulan Oktober 2025 yang telah masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah Nihil.

Buku Register Pengaduan

No	Sumber Pengaduan	Tgl diterima	Subjek	No. Register
-	-	-	-	-

4. Pelayanan Posbakum

Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum, Sarjana syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam perjajian kerjasama Kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Lembaga Pemberi Layanan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Penerima Layanan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekolompok orang di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Laporan penyerapan Anggaran Posbakum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dapat dilihat pada lembar lampiran.

5. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan ke dalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan) berada pada Kepaniteraan Muda Perkara, sedangkan arsip perkara in aktif (berkekuatan hukum tetap), dilimpahkan ke Kepaniteraan Muda Hukum untuk selanjutnya diarsipkan di ruang arsip perkara.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Bagian Kesekretariatan Tugas dan Fungsinya sudah berjalan dengan baik, dalam hal ini untuk Bagian Perencanaan dan Teknologi Informasi sampai dengan Bulan Oktober 2025 sudah melakukan revisi ke sembilan Tahun Anggaran 2025 yaitu DIPA 005.01 dan revisi ke empat untuk DIPA 005.05, Pada Bagian Umum dan Keuangan realisasi anggaran DIPA 01 sebesar 79.57% dan DIPA 05 sebesar 48.86%;
2. Kurangnya Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
3. Sering terjadi gangguan internet layanan telkom yang menyebabkan terhambatnya pekerjaan baik pada bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi antar bagian khususnya Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan dengan Bagian Umum dan Keuangan agar proses revisi anggaran maupun realisasi dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu;
2. Diharapkan penambahan 3 (tiga) unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) untuk Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris, dan Kendaraan Operasional Dinas roda 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) unit untuk Bendahara, Bendahara Keuangan Perkara dan Jurusita Pengganti dalam upaya kelancaran aktivitas kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
3. Perlu penambahan back up internet, karena apabila terjadi gangguan internet layanan telkom, maka ada backup intrenet layanan lainnya

   Demikian Laporan Bulanan ini kami sampaikan untuk digunakan seperlunya.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PALU

ROSIDAH

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Ne

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBP DIPA 005.05